

## STRATEGI MENINGKATKAN KEBERHASILAN AKREDITASI PERPUSTAKAAN MELALUI PENGUATAN KERJA TIM DI BALAI LITBANG AGAMA MAKASSAR

**Jeni Bunga**

Fakultas Teologi dan Sosiologi Kristen, Institut Agama Kristen Negeri Toraja, Indonesia  
Correspondensi author email: [jenibunga363@gmail.com](mailto:jenibunga363@gmail.com)

**Dorkas**

Fakultas Teologi dan Sosiologi Kristen, Institut Agama Kristen Negeri Toraja, Indonesia  
[dorkas701@gmail.com](mailto:dorkas701@gmail.com)

### **Abstract**

*This article discusses the strategy of strengthening teamwork as a key factor in improving the success of library accreditation, with a case study at the Makassar Religious Research and Development Center. Library accreditation is an important process in ensuring the quality of information services in accordance with the National Library Standards (SNP). In the context of a complex and often hierarchical government bureaucracy, teamwork plays a central role in effectively formulating, implementing, and evaluating the entire accreditation process. This study uses a descriptive qualitative approach with data collection methods through in-depth interviews, observations, and documentation studies. The results of the analysis show that the success of accreditation is greatly influenced by factors such as clear division of tasks, open team communication, participatory leadership, and institutional policy support. The strategy of strengthening teamwork through training, reward systems, and the creation of a collaborative work culture has been shown to increase the effectiveness and efficiency of the accreditation process. These findings indicate that in government bureaucracy, organized and structurally supported teamwork can be a strong foundation in building professional and high-standard library services. This article recommends the integration of teamwork into the managerial system of government institutions as a sustainable effort to improve the quality of public services, especially in the library sector.*

**Keywords:** Library Accreditation, Teamwork, Government Bureaucracy, National Library Standards, Managerial Strategy, Makassar Religious Research and Development Center.

### **Abstrak**

Artikel ini membahas strategi penguatan kerja tim sebagai faktor kunci dalam meningkatkan keberhasilan akreditasi perpustakaan, dengan studi kasus pada Balai Litbang Agama Makassar. Akreditasi perpustakaan merupakan proses penting dalam menjamin mutu layanan informasi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan (SNP). Dalam konteks birokrasi pemerintah yang kompleks dan sering kali hierarkis, kerja tim memainkan peran sentral dalam menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi seluruh proses akreditasi secara efektif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil analisis menunjukkan bahwa keberhasilan akreditasi sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti pembagian tugas yang jelas, komunikasi tim yang terbuka, kepemimpinan yang partisipatif, serta dukungan kebijakan kelembagaan. Strategi penguatan kerja tim melalui pelatihan, sistem penghargaan, dan penciptaan budaya kerja kolaboratif terbukti meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses akreditasi. Temuan ini menunjukkan bahwa dalam birokrasi pemerintah, kerja tim yang terorganisasi dan didukung secara struktural dapat menjadi fondasi kuat dalam membangun

layanan perpustakaan yang profesional dan berstandar tinggi. Artikel ini merekomendasikan integrasi kerja tim ke dalam sistem manajerial lembaga pemerintah sebagai upaya berkelanjutan dalam meningkatkan mutu layanan publik, khususnya di sektor perpustakaan.

**Kata Kunci:** Akreditasi Perpustakaan, Kerja Tim, Birokrasi Pemerintah, Standar Nasional Perpustakaan, Strategi Manajerial, Balai Litbang Agama Makassar.

## PENDAHULUAN

Akreditasi perpustakaan merupakan salah satu tolok ukur penting dalam menilai kualitas layanan dan manajemen kelembagaan informasi. Di Indonesia, proses akreditasi ini mengacu pada standar nasional yang ditetapkan oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas), yang mencakup berbagai aspek seperti koleksi, layanan, sarana prasarana, serta pengelolaan dan SDM (Perpusnas, 2020). Sebagai lembaga yang berada dalam lingkup Kementerian Agama, Balai Litbang Agama Makassar memiliki tanggung jawab untuk menjaga mutu dan keberlanjutan layanan perpustakaan sebagai bagian dari fungsi litbang keagamaan. Oleh karena itu, strategi yang tepat sangat dibutuhkan untuk memastikan keberhasilan dalam proses akreditasi perpustakaan.

Keberhasilan akreditasi tidak hanya bergantung pada kelengkapan administrasi atau koleksi semata, melainkan juga pada aspek manajerial, termasuk penguatan kerja tim sebagai motor penggerak organisasi. Kerja tim yang solid, kolaboratif, dan adaptif merupakan prasyarat dalam menjalankan seluruh indikator akreditasi secara optimal (Siregar, 2018). Dalam konteks Balai Litbang Agama Makassar, pembentukan tim akreditasi perpustakaan menjadi ujung tombak dalam menyiapkan dan mengevaluasi seluruh dokumen serta praktik layanan yang akan dinilai. Oleh karena itu, memperkuat kerja tim menjadi strategi yang tidak dapat diabaikan dalam upaya mencapai predikat akreditasi yang maksimal.

Penguatan kerja tim mencakup berbagai elemen penting seperti komunikasi yang efektif, kepemimpinan yang partisipatif, pembagian tugas yang jelas, serta motivasi dan komitmen kolektif terhadap tujuan bersama (Handoko, 2019). Dalam lingkungan birokrasi seperti Balai Litbang, tantangan kerja tim juga bersinggungan dengan budaya kerja yang cenderung hierarkis serta keterbatasan sumber daya. Oleh karena itu, strategi peningkatan efektivitas kerja tim perlu dirancang secara sistematis dan kontekstual sesuai dengan dinamika organisasi. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan adalah manajemen berbasis tim (*team-based management*), yang menekankan peran serta aktif setiap anggota dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan tugas.

Lebih lanjut, praktik kerja tim yang baik dapat mempengaruhi persepsi dan semangat kerja pegawai dalam menyiapkan akreditasi perpustakaan. Hal ini juga berkaitan dengan peningkatan kapasitas personal melalui pelatihan, pembagian peran yang seimbang, serta monitoring dan evaluasi secara berkala (Fitria, 2021). Dalam pengalaman beberapa instansi pemerintah lainnya, pendekatan kolaboratif terbukti mampu mempercepat proses akreditasi dan meminimalkan kesalahan administratif yang umum terjadi jika dikerjakan secara individual. Maka dari itu, studi mengenai strategi penguatan kerja tim menjadi penting untuk memperkaya referensi kelembagaan dalam meraih akreditasi yang optimal.

Selain itu, studi ini memiliki urgensi karena akreditasi bukan hanya sebagai formalitas administratif, tetapi lebih pada bentuk legitimasi kualitas layanan perpustakaan dalam mendukung tugas dan fungsi kelembagaan. Dalam hal ini, Balai Litbang Agama Makassar perlu membangun model kerja tim yang adaptif terhadap perubahan kebijakan dan perkembangan teknologi informasi.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai strategi konkret yang telah dan dapat diterapkan dalam memperkuat kerja tim untuk mendukung proses akreditasi, serta menjadi referensi bagi unit kerja lainnya dalam lingkungan Kementerian Agama.

Sebagai bagian dari lembaga penelitian dan pengembangan, keberhasilan perpustakaan di Balai Litbang Agama Makassar dalam meraih akreditasi juga mencerminkan keberhasilan manajemen pengetahuan dan diseminasi informasi keagamaan. Hal ini memperkuat posisi perpustakaan bukan hanya sebagai tempat penyimpanan dokumen, tetapi juga sebagai pusat rujukan ilmiah dan kebijakan yang berbasis data dan literasi. Dengan demikian, strategi penguatan kerja tim dalam proses akreditasi tidak hanya bernilai instrumental tetapi juga strategis dalam memperkuat posisi institusi di tengah transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berbasis kinerja (Kurniasih, 2022).

Dengan latar belakang tersebut, artikel ini akan mengkaji secara mendalam bagaimana strategi penguatan kerja tim di Balai Litbang Agama Makassar berkontribusi terhadap keberhasilan akreditasi perpustakaan. Penelitian ini penting untuk menggambarkan keterkaitan antara kerja tim yang efektif dengan pencapaian standar akreditasi yang ditetapkan, serta memberikan rekomendasi praktis yang dapat diadopsi oleh institusi sejenis. Fokus kajian ini diharapkan mampu menjawab kebutuhan praktis dan akademis dalam peningkatan kualitas layanan perpustakaan pemerintah.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk menggambarkan secara mendalam strategi penguatan kerja tim dalam meningkatkan keberhasilan akreditasi perpustakaan di Balai Litbang Agama Makassar. Pendekatan ini dipilih karena mampu menangkap dinamika, makna, dan pengalaman subyektif para informan dalam konteks kerja tim dan proses akreditasi (Moleong, 2019). Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan beberapa informan kunci, yaitu kepala perpustakaan, anggota tim akreditasi, dan pejabat struktural terkait. Selain itu, observasi partisipatif dan studi dokumentasi terhadap dokumen-dokumen akreditasi, laporan kegiatan, serta notulensi rapat tim turut digunakan untuk memperoleh data yang komprehensif. Teknik analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sebagaimana dikemukakan oleh Miles dan Huberman (2020). Validitas data diperkuat dengan teknik triangulasi sumber dan metode, untuk memastikan bahwa data yang diperoleh akurat dan mewakili kondisi nyata di lapangan. Dengan pendekatan ini, diharapkan hasil penelitian dapat memberikan gambaran holistik mengenai praktik kerja tim yang efektif dan strategis dalam mendukung pencapaian akreditasi perpustakaan secara optimal.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Urgensi Akreditasi Perpustakaan sebagai Instrumen Peningkatan Mutu Layanan**

Akreditasi perpustakaan merupakan suatu proses evaluasi yang sistematis dan menyeluruh terhadap mutu dan kinerja suatu perpustakaan berdasarkan standar yang telah ditetapkan oleh lembaga berwenang, dalam hal ini Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Standar Nasional Perpustakaan (SNP) mengatur berbagai aspek penting seperti koleksi, sarana dan prasarana, layanan, sumber daya manusia, penyelenggaraan, dan manajemen perpustakaan (Perpusnas, 2020). Tujuan utama dari akreditasi ini adalah untuk menjamin bahwa layanan perpustakaan memenuhi kualitas minimum yang dapat diterima dan memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan

ilmu pengetahuan dan informasi. Dalam konteks lembaga pemerintah seperti Balai Litbang Agama Makassar, akreditasi perpustakaan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menjadi wujud tanggung jawab institusi terhadap penyediaan layanan informasi yang profesional dan bermutu.

Pentingnya akreditasi tidak terlepas dari fungsinya sebagai instrumen evaluatif sekaligus pengembangan kualitas layanan perpustakaan secara berkelanjutan. Dengan adanya akreditasi, perpustakaan didorong untuk melakukan perbaikan dan pembenahan dalam berbagai aspek, termasuk peningkatan kualitas koleksi, penyediaan layanan prima kepada pengguna, serta peningkatan kompetensi pustakawan dan tenaga pendukung lainnya. Dalam praktiknya, proses akreditasi mendorong perpustakaan untuk tidak hanya fokus pada keberadaan fisik koleksi dan sarana, tetapi juga pada kualitas akses informasi, layanan digital, dan kepuasan pengguna. Hal ini sejalan dengan pemikiran Sutarno (2017) yang menyatakan bahwa akreditasi berperan sebagai mekanisme kontrol mutu dan alat peningkatan kinerja secara menyeluruh.

Lebih dari itu, akreditasi perpustakaan berperan sebagai alat legitimasi terhadap kualitas suatu institusi. Dengan memperoleh status akreditasi, perpustakaan memperoleh pengakuan formal dari lembaga otoritatif mengenai pencapaian standar mutu tertentu. Pengakuan ini penting bagi perpustakaan pemerintah maupun lembaga pendidikan karena memperkuat posisi kelembagaan dalam hal kredibilitas, daya saing, serta dukungan anggaran dan kebijakan. Dalam konteks Balai Litbang Agama Makassar, akreditasi yang baik dapat menunjang fungsi kelembagaan dalam menghasilkan riset keagamaan yang berkualitas serta memperkuat literasi keagamaan masyarakat melalui layanan informasi yang handal. Menurut Kurniasih (2022), lembaga pemerintah yang memiliki perpustakaan terakreditasi lebih mudah mendapatkan dukungan program literasi dan pengembangan informasi dari mitra nasional maupun internasional.

Selanjutnya, proses akreditasi juga memacu terjadinya inovasi dan adaptasi teknologi dalam pengelolaan perpustakaan. Standar akreditasi mendorong perpustakaan untuk bertransformasi dalam menghadirkan layanan yang sesuai dengan perkembangan zaman, seperti digitalisasi koleksi, katalog daring, dan sistem layanan otomatis. Transformasi ini sangat relevan di era informasi digital yang menuntut kemudahan akses, kecepatan layanan, dan keterbukaan informasi. Penerapan teknologi informasi dalam manajemen perpustakaan menjadi indikator penting dalam penilaian akreditasi (Rahmat & Utami, 2020). Oleh karena itu, perpustakaan yang ingin meraih atau mempertahankan akreditasi tinggi harus senantiasa berinovasi dan mengembangkan sistem layanan yang responsif terhadap kebutuhan pengguna.

Di samping aspek internal, akreditasi juga berdampak pada persepsi dan kepuasan pengguna terhadap layanan perpustakaan. Pengguna cenderung lebih percaya dan merasa nyaman menggunakan layanan dari perpustakaan yang terakreditasi karena dianggap telah memenuhi standar tertentu. Akreditasi juga memberikan jaminan bahwa pengelolaan koleksi dan penyediaan informasi dilakukan secara profesional, sehingga mendukung proses belajar, riset, dan pengambilan keputusan berbasis informasi. Hasil survei pengguna di beberapa perpustakaan terakreditasi menunjukkan adanya peningkatan tingkat kepuasan dan frekuensi kunjungan setelah akreditasi diperoleh (Fitria, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa akreditasi tidak hanya berdampak pada aspek administratif tetapi juga pada persepsi publik yang lebih luas.

Lebih jauh, akreditasi perpustakaan menjadi sarana untuk menumbuhkan budaya kerja berbasis mutu di lingkungan perpustakaan dan lembaga induknya. Dalam proses persiapan

akreditasi, seluruh elemen perpustakaan terlibat dalam pengumpulan data, penyusunan dokumen, evaluasi diri, dan perencanaan perbaikan. Proses ini menumbuhkan kesadaran kolektif mengenai pentingnya bekerja berdasarkan standar dan orientasi mutu. Seiring berjalannya waktu, budaya kerja ini dapat menjadi kebiasaan institusional yang mendorong perbaikan terus-menerus dan menjamin keberlangsungan pelayanan yang berkualitas. Menurut Siregar (2018), akreditasi dapat menjadi titik tolak reformasi manajemen perpustakaan ke arah yang lebih profesional dan akuntabel.

Akhirnya, urgensi akreditasi perpustakaan di Balai Litbang Agama Makassar tidak dapat dilepaskan dari fungsi strategis perpustakaan sebagai pusat informasi keagamaan dan ilmu sosial yang berbasis riset. Dalam rangka mendukung visi lembaga sebagai pusat penelitian dan pengembangan agama, perpustakaan harus mampu menyediakan layanan yang terpercaya, relevan, dan mudah diakses. Melalui akreditasi, perpustakaan memperoleh kerangka kerja yang jelas dalam menjalankan fungsinya, sekaligus peluang untuk memperkuat jejaring kerjasama dengan perpustakaan lain, lembaga akademik, serta pemangku kebijakan. Dengan demikian, akreditasi bukan sekadar pencapaian administratif, tetapi merupakan langkah strategis dalam memperkuat kapasitas kelembagaan dan peran perpustakaan dalam pembangunan literasi keagamaan nasional.

### **Peran Sentral Kerja Tim dalam Menyukseskan Proses Akreditasi**

Kerja tim merupakan salah satu pilar utama dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan akreditasi perpustakaan, terutama dalam konteks lembaga pemerintah seperti Balai Litbang Agama Makassar. Proses akreditasi tidak hanya menuntut kesiapan dokumen administratif, tetapi juga membutuhkan koordinasi intensif, sinergi peran, serta pembagian tugas yang sistematis antar anggota tim. Dalam situasi ini, kerja tim menjadi wadah kolaborasi untuk memastikan bahwa seluruh standar yang ditetapkan oleh Perpustakaan Nasional dapat dipenuhi secara menyeluruh dan tepat waktu (Perpusnas, 2020). Tanpa tim kerja yang solid dan terorganisir, upaya mencapai akreditasi akan menghadapi berbagai hambatan, baik dari sisi teknis, manajerial, maupun operasional.

Salah satu bentuk peran penting tim akreditasi adalah dalam pembagian tugas secara proporsional berdasarkan kompetensi dan latar belakang masing-masing anggota. Dengan pembagian yang tepat, setiap indikator akreditasi dapat ditangani oleh individu yang memiliki pemahaman dan keterampilan yang relevan. Hal ini meningkatkan efisiensi kerja dan mengurangi potensi kesalahan dalam penyusunan dokumen serta pengisian instrumen evaluasi. Menurut Handoko (2019), keberhasilan suatu tim kerja sangat dipengaruhi oleh kejelasan peran, koordinasi yang efektif, serta adanya kepercayaan antar anggota. Dalam konteks Balai Litbang Agama Makassar, praktik kerja tim yang terstruktur menjadi salah satu kunci utama dalam menyusun borang akreditasi yang sesuai dengan standar nasional.

Selain itu, kerja tim memungkinkan terjadinya proses komunikasi dan diskusi yang terbuka, sehingga setiap kendala atau kekurangan dalam persiapan akreditasi dapat segera diidentifikasi dan dicarikan solusi bersama. Komunikasi yang efektif dalam tim menciptakan suasana kerja yang saling mendukung dan menghindari kesenjangan informasi yang bisa berakibat fatal dalam proses penilaian akreditasi. Fitria (2021) menekankan bahwa komunikasi yang terbuka dalam tim memungkinkan terjadinya pembelajaran bersama, peningkatan kapasitas individu, serta penguatan rasa tanggung jawab kolektif terhadap keberhasilan tim. Oleh karena itu, tim akreditasi perlu didorong untuk menjaga

jalur komunikasi yang intensif, baik melalui rapat berkala, forum diskusi daring, maupun aplikasi manajemen proyek.

Kerja tim juga berperan dalam menjaga semangat dan motivasi seluruh anggota dalam menghadapi beban kerja yang tidak ringan selama proses akreditasi. Tugas yang berulang, deadline yang ketat, serta tekanan administratif dapat memicu kelelahan dan penurunan produktivitas jika tidak dikelola dengan baik. Dalam hal ini, kepemimpinan tim yang inklusif dan suportif sangat diperlukan untuk menjaga semangat kerja dan menyatukan visi seluruh anggota terhadap tujuan bersama. Studi Siregar (2018) menunjukkan bahwa tim kerja yang memiliki kepemimpinan partisipatif cenderung lebih tangguh dalam menghadapi tekanan kerja dan mampu menyelesaikan tugas dengan kualitas yang tinggi. Hal ini juga tampak dalam pengalaman tim akreditasi Balai Litbang Agama Makassar yang menunjukkan sinergi antara pimpinan dan anggota tim dalam menyusun serta melengkapi indikator akreditasi.

Tidak kalah penting, kerja tim dalam proses akreditasi memberikan ruang bagi refleksi dan evaluasi diri secara kolektif terhadap kondisi dan kinerja perpustakaan. Setiap anggota tim memiliki peran dalam mengkaji sejauh mana standar telah dipenuhi dan apa saja aspek yang perlu ditingkatkan. Proses evaluasi ini menjadi dasar dalam merumuskan rencana tindak lanjut dan strategi perbaikan yang lebih tepat sasaran. Dalam konteks ini, kerja tim bukan hanya bertugas menyiapkan dokumen, tetapi juga berfungsi sebagai agen perubahan yang mendorong perbaikan layanan perpustakaan secara menyeluruh. Menurut Rahmat dan Utami (2020), tim kerja yang diberi tanggung jawab penuh atas proses mutu akan lebih peduli terhadap hasil jangka panjang dan berorientasi pada pembangunan sistem berkelanjutan.

Lebih lanjut, kerja tim memungkinkan terbangunnya budaya kolaboratif yang melampaui proyek akreditasi itu sendiri. Ketika anggota tim mengalami keberhasilan bersama dalam mencapai akreditasi, akan tumbuh rasa kebersamaan, saling menghargai, dan komitmen untuk mempertahankan standar mutu yang telah dicapai. Budaya ini penting untuk menjamin keberlangsungan pelayanan yang berkualitas bahkan setelah masa akreditasi berakhir. Sebagaimana ditegaskan oleh Kurniasih (2022), organisasi yang berhasil membangun budaya kerja tim yang kuat akan lebih siap dalam menghadapi tantangan-tantangan baru dan lebih adaptif terhadap perubahan. Dalam konteks Balai Litbang Agama Makassar, keberhasilan akreditasi perpustakaan diharapkan menjadi model kerja kolaboratif bagi unit-unit lain dalam meningkatkan kinerja kelembagaan secara umum.

Akhirnya, peran sentral kerja tim dalam proses akreditasi mencerminkan pentingnya pendekatan kolektif dalam mengelola perubahan dan mencapai mutu kelembagaan. Proses akreditasi yang kompleks tidak mungkin diselesaikan oleh satu individu atau unit kerja saja, melainkan membutuhkan integrasi antar bagian dalam sebuah kerangka kerja tim yang efektif. Dalam hal ini, pembentukan, penguatan, dan pendampingan terhadap tim akreditasi perlu menjadi prioritas dalam manajemen kelembagaan. Dengan kerja tim yang solid, akreditasi bukan lagi beban administratif semata, tetapi menjadi momentum strategis untuk mentransformasi layanan perpustakaan menjadi lebih unggul dan profesional secara berkelanjutan.

### **Strategi Penguatan Kerja Tim dalam Konteks Birokrasi Pemerintah**

Penguatan kerja tim dalam lingkungan birokrasi pemerintah merupakan tantangan yang kompleks karena menyangkut budaya kerja yang cenderung hierarkis, prosedural, serta terbatasnya fleksibilitas dalam pengambilan keputusan. Namun demikian, dalam rangka menyukseskan proses akreditasi perpustakaan, seperti di Balai Litbang Agama Makassar, upaya strategis untuk membangun tim yang solid, komunikatif, dan berorientasi pada hasil sangat penting dilakukan. Kerja tim menjadi kebutuhan mendesak karena proses akreditasi menuntut kolaborasi lintas unit, kejelasan peran, serta koordinasi berkelanjutan dalam memenuhi indikator Standar Nasional Perpustakaan (Perpusnas, 2020). Oleh karena itu, strategi penguatan kerja tim harus dirancang sesuai dengan karakteristik birokrasi yang ada, namun tetap mengusung prinsip efisiensi dan partisipasi.

Salah satu strategi utama dalam penguatan kerja tim adalah pelibatan aktif seluruh pemangku kepentingan sejak awal proses pembentukan tim akreditasi. Setiap anggota tim perlu memahami tugas pokok dan fungsi mereka secara jelas, serta memiliki komitmen terhadap tujuan bersama. Pelibatan ini dapat diwujudkan melalui lokakarya internal, diskusi terbuka, dan penyusunan rencana kerja partisipatif. Menurut Siregar (2018), keterlibatan sejak tahap perencanaan akan meningkatkan rasa memiliki terhadap tugas dan memperkuat loyalitas terhadap hasil yang ingin dicapai. Dalam konteks birokrasi pemerintah, strategi ini penting untuk menghindari resistensi kerja dan membangun rasa tanggung jawab kolektif di tengah struktur organisasi yang formal.

Strategi berikutnya adalah membangun sistem komunikasi tim yang efektif, transparan, dan berkesinambungan. Dalam struktur birokrasi, komunikasi seringkali bersifat satu arah dan menurun dari pimpinan ke bawahan. Padahal, dalam kerja tim, diperlukan komunikasi dua arah yang terbuka untuk mendorong diskusi, pertukaran gagasan, dan penyelesaian masalah secara bersama. Balai Litbang Agama Makassar menerapkan sistem rapat koordinasi mingguan, grup komunikasi daring, dan laporan kemajuan terjadwal sebagai cara untuk menjaga keterhubungan tim secara fungsional. Hal ini sejalan dengan pendapat Fitria (2021) yang menyatakan bahwa komunikasi yang terbuka dalam tim dapat meningkatkan kejelasan tujuan, efisiensi waktu, serta memperkuat koordinasi antarunit kerja.

Penguatan kerja tim juga perlu ditopang oleh kepemimpinan yang kolaboratif dan inspiratif. Dalam birokrasi, model kepemimpinan cenderung otoritatif dan berbasis instruksi. Namun, untuk mengembangkan kerja tim yang produktif, dibutuhkan pemimpin tim yang mampu menjadi fasilitator, pendengar aktif, serta pembina semangat kerja. Pemimpin tim akreditasi harus mampu menyatukan berbagai latar belakang dan kompetensi anggota dalam satu visi, serta memberikan ruang bagi inisiatif dan kreativitas. Handoko (2019) menyebutkan bahwa pemimpin yang efektif dalam konteks kerja tim birokrasi adalah mereka yang mampu bertransformasi dari gaya direktif ke gaya partisipatif yang adaptif terhadap perubahan.

Selanjutnya, penguatan tim dapat dilakukan melalui peningkatan kapasitas dan pelatihan yang relevan dengan proses akreditasi. Dalam birokrasi pemerintah, masih sering ditemukan keterbatasan pelatihan khusus yang mendukung tugas teknis seperti pengisian instrumen akreditasi, manajemen dokumen, serta penggunaan teknologi informasi. Oleh karena itu, strategi penguatan harus mencakup program pelatihan internal, pembelajaran bersama, dan studi banding ke perpustakaan lain yang telah terakreditasi. Rahmat dan Utami (2020) menegaskan bahwa pelatihan berbasis kebutuhan dan praktik langsung di lapangan dapat meningkatkan efektivitas kerja tim dan mempercepat proses adaptasi terhadap tuntutan akreditasi.

Strategi lainnya adalah memberikan penghargaan dan insentif terhadap kinerja tim. Dalam konteks birokrasi, motivasi kerja sering terhambat oleh minimnya penghargaan atas kerja kolektif. Maka, penguatan kerja tim perlu disertai dengan sistem penghargaan yang adil dan proporsional, baik dalam bentuk pujian, sertifikat, peluang pengembangan karier, maupun insentif administratif. Pengakuan atas kontribusi individu dan tim secara keseluruhan dapat meningkatkan semangat kerja, membangun budaya kompetitif yang sehat, serta mendorong keberlanjutan kerja tim dalam proyek kelembagaan lainnya (Kurniasih, 2022). Di Balai Litbang Agama Makassar, pemberian penghargaan ini menjadi salah satu pendorong utama dalam memperkuat kerja tim akreditasi.

Terakhir, strategi penguatan kerja tim dalam birokrasi pemerintah harus didukung oleh kebijakan lembaga yang akomodatif terhadap kerja kolaboratif. Kebijakan tersebut mencakup alokasi waktu kerja yang cukup untuk kegiatan tim, dukungan anggaran, pengakuan struktural terhadap peran tim akreditasi, serta adanya mekanisme evaluasi tim secara berkala. Tanpa dukungan kebijakan yang memadai, upaya penguatan tim akan mengalami stagnasi. Perlu ada keberanian pimpinan lembaga untuk mereformasi pola kerja tradisional menjadi lebih fleksibel, berbasis tim, dan berorientasi pada hasil kerja nyata. Dengan dukungan ini, kerja tim dalam birokrasi pemerintah tidak hanya menjadi alat penyelesaian tugas sementara, tetapi juga sebagai pilar transformasi organisasi menuju tata kelola yang lebih partisipatif dan profesional.

## **KESIMPULAN**

Artikel ini menegaskan bahwa keberhasilan akreditasi perpustakaan, khususnya di lingkungan birokrasi pemerintah seperti Balai Litbang Agama Makassar, tidak dapat dilepaskan dari peran strategis kerja tim yang solid, kolaboratif, dan adaptif. Akreditasi bukan hanya sekadar proses administratif, melainkan merupakan instrumen penting untuk memastikan kualitas layanan perpustakaan sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan (SNP). Proses ini menuntut keterlibatan aktif seluruh unsur dalam organisasi, mulai dari pengelola perpustakaan, pimpinan lembaga, hingga tim teknis yang menangani berbagai indikator akreditasi. Dalam konteks ini, penguatan kerja tim menjadi sebuah keharusan yang tidak bisa diabaikan. Kerja tim yang efektif memungkinkan terlaksananya pembagian tugas yang proporsional, komunikasi yang terbuka, serta koordinasi yang terarah dalam setiap tahap persiapan akreditasi. Di samping itu, semangat kolektif dalam tim menciptakan motivasi kerja yang tinggi dan mempercepat pencapaian target-target yang telah ditetapkan. Strategi penguatan kerja tim dalam birokrasi pemerintah dapat dilakukan melalui pelibatan aktif anggota sejak awal, pelatihan teknis yang relevan, sistem komunikasi yang efisien, kepemimpinan partisipatif, serta pemberian insentif atas capaian tim. Seluruh elemen tersebut saling terkait dan berkontribusi langsung pada keberhasilan akreditasi perpustakaan. Di tengah tantangan birokrasi yang cenderung hierarkis dan prosedural, penguatan kerja tim merupakan pendekatan transformatif yang dapat memperbaiki pola kerja tradisional menuju tata kelola berbasis partisipasi dan mutu. Dengan membangun budaya kolaboratif, institusi seperti Balai Litbang Agama Makassar tidak hanya mampu meraih akreditasi perpustakaan dengan baik, tetapi juga menciptakan iklim kerja yang kondusif untuk peningkatan kualitas layanan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, keberhasilan akreditasi harus dimaknai sebagai hasil dari integrasi antara profesionalisme manajerial, kekuatan kerja tim, dan komitmen kelembagaan terhadap mutu. Lebih jauh, pengalaman dalam membentuk dan memperkuat tim akreditasi dapat dijadikan model kerja yang diterapkan dalam proyek-proyek



pengembangan kelembagaan lainnya. Hal ini akan memperkuat posisi perpustakaan sebagai pusat informasi dan rujukan ilmiah yang kredibel di lingkungan Kementerian Agama. Dengan demikian, strategi penguatan kerja tim dalam proses akreditasi bukan hanya berdampak pada hasil akhir akreditasi, tetapi juga memperkokoh fondasi manajemen pengetahuan dan budaya kerja profesional di lingkungan birokrasi. Rekomendasi dari kajian ini adalah perlunya institusi pemerintah untuk menjadikan kerja tim sebagai strategi kelembagaan yang terstruktur dan berkelanjutan. Dukungan kebijakan, pendampingan teknis, serta evaluasi berkala terhadap tim menjadi faktor kunci dalam menjaga keberlangsungan budaya kerja tim yang produktif. Dalam jangka panjang, pendekatan ini akan memperkuat akuntabilitas publik dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan yang diberikan institusi pemerintah, khususnya melalui perpustakaan. Dengan demikian, artikel ini menyimpulkan bahwa strategi penguatan kerja tim memiliki kontribusi yang sangat signifikan dalam menyukseskan proses akreditasi perpustakaan di Balai Litbang Agama Makassar. Upaya ini tidak hanya berdampak pada pencapaian administratif semata, melainkan juga membangun fondasi kelembagaan yang lebih tangguh, profesional, dan berorientasi pada mutu layanan publik yang berkelanjutan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Fitria, N. (2021). *Manajemen Tim Kerja dalam Meningkatkan Kinerja Organisasi*. Yogyakarta: Deepublish.
- Handoko, T. H. (2019). *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: BPFE.
- Kurniasih, D. (2022). *Transformasi Digital dalam Layanan Perpustakaan Pemerintah*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. (2020). *Standar Nasional Perpustakaan*. Jakarta: Perpustnas.
- Rahmat, R., & Utami, T. (2020). *Inovasi Teknologi Informasi dalam Layanan Perpustakaan*. Bandung: Alfabeta.
- Siregar, R. M. (2018). *Manajemen Perpustakaan Berbasis Mutu*. Bandung: Alfabeta.
- Sutarno, N. S. (2017). *Perpustakaan dan Masyarakat*. Jakarta: Sagung Seto.